



RENCANA
AKSI KINERJA

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KALIMANTAN II

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Dokumen Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kalimantan II Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai bentuk penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) BP3KP Kalimantan II Tahun 2025-2029, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kinerja secara terukur dan akuntabel. Dokumen ini juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II yang telah ditetapkan, sehingga target kinerja yang telah direncanakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Dokumen Rencana Aksi ini memuat sasaran kinerja, indikator kinerja, target yang ingin dicapai, serta rencana aksi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan, sekaligus sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini, baik dari internal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II maupun pemangku kepentingan terkait lainnya. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan yang efektif, serta dapat mendorong sinergi antarunit dan mitra kerja dalam rangka mewujudkan penyediaan perumahan layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman, serta perluasan akses hunian yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara berkelanjutan.

Akhir kata, semoga Dokumen Rencana Aksi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II secara optimal.

Samarinda, 13 April 2026

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kalimantan II



Mustofa Ottfan, S.T., M.M.

NIP. 19830318 200901 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR GAMBAR.....	V
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Tugas dan Fungsi	3
1.2.1. Tugas.....	4
1.2.2. Fungsi.....	4
1.3 Struktur Organisasi BP3KP Kalomantan II	5
1.4 Sumber Daya Manusia.....	7
1.5 Isu Strategis.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Penetapan Target Kinerja	15
2.2 Penetapan Target Kinerja Triwulan	47
BAB III PENUTUP	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai BP3KP Kalimantan II	7
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai BP3KP Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Bidang Pendidikan	7
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai BP3KP Kalimantan II Berdasarkan Status Kepegawaian	8
Tabel 1.4	Jumlah Pegawai BP3KP Kalimantan II Berdasarkan Golongan	9
Tabel 1.5	Data <i>Backlog</i> Kepemilikan di Wilayah Kerja BP3KP Kalimantan II	10
Tabel 1.6	Data Backlog RTLH di Wilayah Kerja BP3KP Kalimantan II	11
Tabel 1.7	Luasan Wilayah Kumuh Menurut Kewenangan di Wilayah Kerja BP3KP Kalimantan II	11
Tabel 2.1	Kronologi Revisi Dokumen	16
Tabel 2.2	Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Sekretariat Jenderal	17
Tabel 2.3	Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	20
Tabel 2.4	Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Revisi ke 1 BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	22
Tabel 2.5	Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	26
Tabel 2.6	Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Revisi ke 1 BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	28
Tabel 2.7	Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	32
Tabel 2.8	Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Revisi ke 1 BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	35
Tabel 2.9	Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	39
Tabel 2.10	Target Rencana Strategis BP3KP Kalimantan II Tahun 2026	41
Tabel 2.11	Target Triwulan Kegiatan BP3KP Kalimantan II	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BP3KP Kalimantan II	6
Gambar 1.2 Jumlah Pegawai BP3KP Berdasarkan Tingkat Pendidikan	8
Gambar 1.3 Pegawai BP3KP Kalimantan II Berdasarkan Status Kepegawaian.....	8
Gambar 1.4 Pegawai BP3KP Berdasarkan Golongan	9

BAB 1

Pendahuluan

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kalimantan II

Tahun Anggaran
2026



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Aksi BP3KP Kalimantan II Tahun 2026 merupakan dokumen turunan dari Perjanjian Kinerja yang memuat penjabaran target kinerja ke dalam rencana aksi yang lebih operasional, lengkap dengan tahapan pelaksanaan, jadwal waktu, serta penanggung jawab kegiatan. Dokumen ini berfungsi sebagai alat kendali (*control tool*) dalam memastikan bahwa setiap target kinerja dapat dicapai secara efektif, efisien, dan tepat waktu. Dokumen ini juga menjabarkan target yang tertuang dalam Rencana Strategis BP3KP Kalimantan II Tahun 2025-2029, dimana dalam dokumen ini terfokus menjabarkan target pada tahun 2026. Selain itu, Rencana Aksi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung proses monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, baik bulanan maupun triwulanan. Dengan adanya Dokumen Rencana Aksi, potensi deviasi atau ketidaktercapaian target dapat diidentifikasi lebih dini, sehingga dapat segera dilakukan langkah-langkah perbaikan (*corrective action*).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan; mengamanatkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak dasar atas perumahan dan permukiman. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40 bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Pemenuhan hak dasar Warga Negara Indonesia atas tempat tinggal yang layak diwujudkan melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Salah satu tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 adalah mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk secara merata melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Kalimantan II yang memiliki 4 (empat) wilayah kerja yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi

Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, dan IKN, dimana BP3KP Kalimantan II memiliki mandat untuk menjalankan program-program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ke dalam langkah-langkah operasional yang konkret, guna memastikan penyediaan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat terealisasi secara efektif di tingkat daerah.

Angka *backlog* perumahan di wilayah kerja BP3KP Kalimantan II masih tergolong tinggi. Berdasarkan data yang tersedia, di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat sebanyak 176.555 KK yang termasuk dalam *backlog* kepemilikan rumah serta 284.729 KK yang menempati Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Sementara itu, di Provinsi Kalimantan Utara tercatat sebanyak 30.124 KK masih berada dalam *backlog* kepemilikan dan 36.340 KK memiliki hunian tidak layak. Adapun di Provinsi Kalimantan Timur, *backlog* kepemilikan rumah mencapai 162.569 KK, dengan 97.002 KK masih menempati RTLH.

Selain permasalahan tersebut, masing-masing wilayah kerja BP3KP Kalimantan II juga menghadapi tantangan lain yang tidak kalah kompleks, seperti penanganan kawasan kumuh serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang layak, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, BP3KP Kalimantan II memiliki tanggung jawab strategis untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unit pelaksana teknis Kementerian PKP dalam penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman yang layak, aman, dan berkelanjutan.

Sejalan dengan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pelaksanaan tugas dan fungsi BP3KP Kalimantan II harus berlandaskan pada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, menjadi instrumen krusial dalam mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian PKP. SAKIP tidak hanya berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mengukur keberhasilan kinerja organisasi dalam mencapai sasaran strategis, yaitu meningkatnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Melalui implementasi SAKIP yang konsisten, BP3KP Kalimantan II berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola, integritas, dan pengawasan internal guna mendukung capaian kinerja Kementerian.

1.2 Tugas dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman dan secara teknis berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II melaksanakan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1.2.1. Tugas

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II memiliki tugas untuk melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan Kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial, dan fasilitasi serah terima aset.

1.2.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- b. Penyusunan rencana teknis pengembangan Kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- c. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- d. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan Kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- i. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- j. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
- l. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;

- m. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
- n. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
- o. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

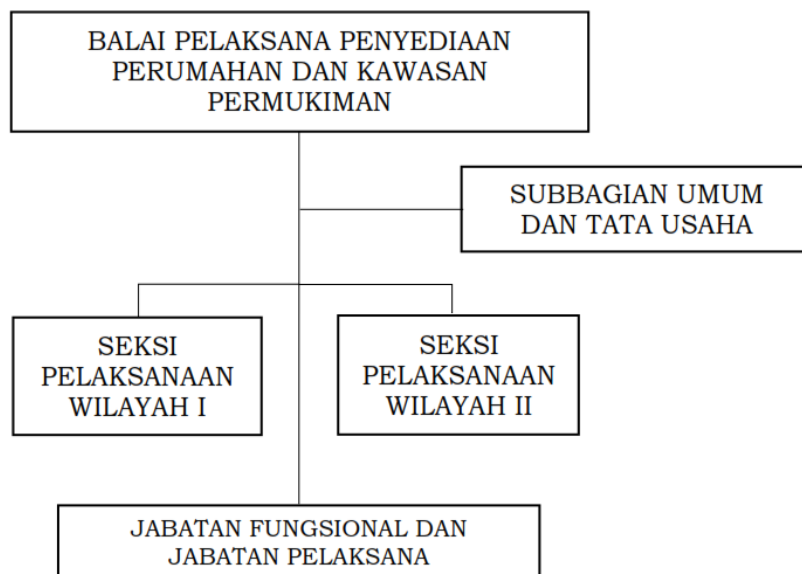
1.3 Struktur Organisasi BP3KP Kalomantan II

Berikut adalah penjelasan terkait Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II:

- Mengacu pada Permen PKP No. 1 Tahun 2025, Kepala Balai mempunyai tugas memimpin perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi program penyediaan perumahan dan kawasan permukiman pada wilayah kerjanya. Kepala Balai bertanggung jawab memastikan penyelenggaraan pembangunan rumah umum, prasarana–sarana utilitas, rumah khusus, rumah swadaya, serta dukungan penataan bangunan dan lingkungan berjalan sesuai kebijakan nasional. Kepala Balai melakukan koordinasi lintas pemerintah daerah, instansi vertikal, dan mitra kerja untuk menjamin kelancaran program, termasuk melakukan pengawasan teknis, administrasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Direktorat Jenderal terkait di Kementerian PKP. Selain itu, Kepala Balai memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan kegiatan mematuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, penerapan SPIP, manajemen risiko, dan zona integritas menuju WBK/WBBM.
- Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan administrasi sumber daya manusia, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, koordinasi administrasi pelaksanaan sistem pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.
- Seksi Pelaksanaan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pembinaan usaha dan perlindungan konsumen, serta koordinasi dan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial; dan melakukan koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data, pada wilayah pesisir sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

- Seksi Pelaksanaan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan dan koordinasi penyusunan rencana teknis perumahan, koordinasi penyediaan lahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum, fasilitasi penghunian, pengawasan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, verifikasi data pada wilayah perkotaan dan perdesaan sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai delineasi perkotaan, perdesaan, dan pesisir.
- Kepala Satuan Kerja PKP bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan pembangunan perumahan di masing-masing wilayah kerja BP3KP Kalimantan II, yang meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan IKN Nusantara. Kepala Satker memimpin perencanaan program, pelaksanaan konstruksi, pengawasan mutu pekerjaan, pengendalian kontrak, serta penyusunan pelaporan fisik dan keuangan. Selain itu, Kepala Satker memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai regulasi, standar teknis, dan prinsip akuntabilitas, serta melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah, penyedia jasa, dan unit terkait untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembangunan perumahan di wilayahnya.
- Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Berikut adalah bagan Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II, berdasarkan Permen PKP No. 1 Tahun 2025.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BP3KP Kalimantan II

1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam konteks BP3KP Kalimantan II, SDM berperan strategis dalam menunjang keberhasilan program dan kegiatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan SDM yang optimal, baik dari aspek jumlah, kompetensi, maupun distribusinya. Berikut adalah gambaran kondisi SDM BP3KP Kalimantan II yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi dan tantangan dalam pengelolaan kegiatan yang berjalan, sebagai dasar dalam mendukung pencapaian target kinerja organisasi secara efektif dan akuntabel. Berikut adalah jumlah pegawai BP3KP Kalimantan II yang terdata pada tahun 2026.

Tabel 1.1 Data Pegawai BP3KP Kalimantan II

No	Unit Kerja	Pegawai				Total
		PNS	CPNS	PPPK	Non PNS	
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman	6	20	7	10	43
2	Satuan Kerja PKP Kalimantan Timur	6	9	11	0	26
3	Satuan Kerja PKP Ibu Kota Negara Nusantara	8	10	4	22	44
4	Satuan Kerja PKP Kalimantan Selatan	5	7	15	5	32
5	Satuan Kerja PKP Kalimantan Utara	3	8	6	0	17
Total Keseluruhan		28	54	43	37	162

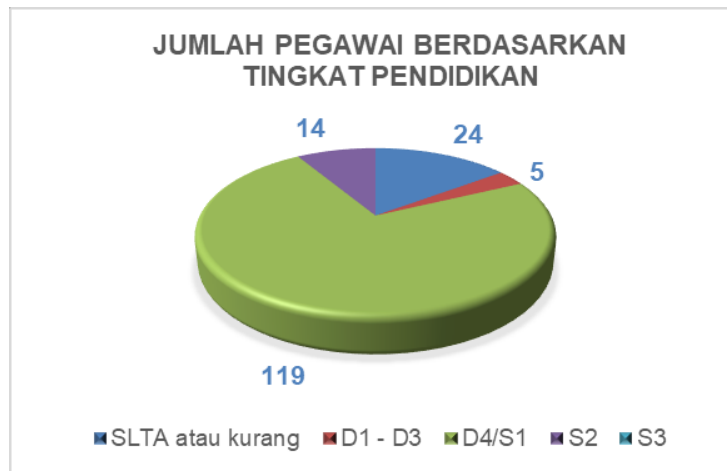
Sumber: Data BP3KP Kalimantan II

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan merupakan indikator penting dalam menggambarkan kualitas sumber daya manusia pada suatu organisasi. Komposisi ini mencerminkan tingkat kompetensi pegawai serta menjadi dasar dalam perencanaan pengembangan SDM guna mendukung pencapaian kinerja organisasi. Berikut adalah jumlah pegawai BP3KP Kalimantan II berdasarkan tingkat Pendidikan.

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai BP3KP Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Bidang Pendidikan

Pendidikan	Bidang Pendidikan		Jumlah
	Teknik	Non Teknik	
SLTA atau kurang	0	24	24
D1 - D3	2	3	5
D4/S1	90	29	119
S2	13	1	14
Total	105	57	162

Sumber: Data BP3KP Kalimantan II



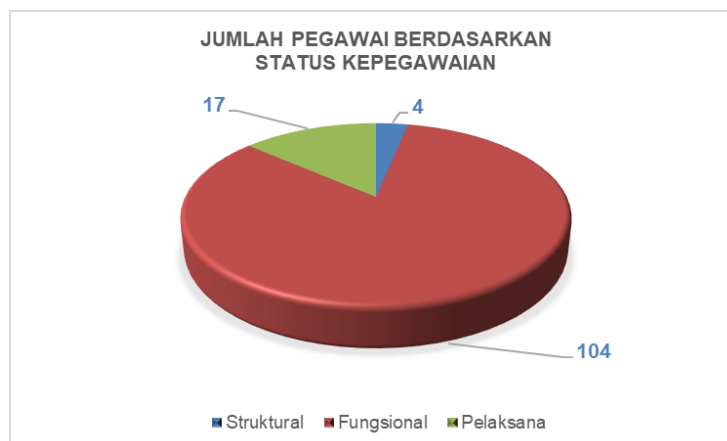
Gambar 1.2 Jumlah Pegawai BP3KP Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian merupakan salah satu aspek penting dalam menggambarkan struktur sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Pengelompokan ini memberikan gambaran mengenai komposisi pegawai, baik yang berstatus struktural, fungsional, maupun pelaksana, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengelolaan SDM, perencanaan kebutuhan pegawai, serta optimalisasi kinerja organisasi secara keseluruhan. Berikut adalah jumlah pegawai BP3KP Kalimantan II berdasarkan status kepegawaian.

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai BP3KP Kalimantan II Berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Struktural	4	0	4
Fungsional	67	37	104
Pelaksana	14	3	17
Total	85	40	125

Sumber: Data BP3KP Kalimantan II



Gambar 1.3 Pegawai BP3KP Kalimantan II Berdasarkan Status Kepegawaian

Jumlah pegawai berdasarkan golongan merupakan indikator penting dalam menggambarkan struktur dan jenjang karier aparatur sipil negara dalam suatu organisasi.

Pengelompokan ini mencerminkan tingkat kepangkatan, pengalaman, serta tanggung jawab yang diemban, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengelolaan SDM, pembinaan karier, dan perencanaan kebutuhan pegawai guna mendukung peningkatan kinerja organisasi.

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai BP3KP Kalimantan II Berdasarkan Golongan

Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Golongan III/a	40	17	57
Golongan III/b	2	4	6
Golongan III/c	2	0	2
Golongan III/d	6	1	7
Golongan IV/a	8	0	8
Golongan IV/b	1	1	2
Total	59	23	82

Sumber: Data BP3KP Kalimantan II



Gambar 1.4 Pegawai BP3KP Berdasarkan Golongan

Pengelolaan sumber daya manusia merupakan aspek strategis dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan. Upaya pengelolaan SDM dilakukan melalui perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan kompetensi, serta pengelolaan kinerja yang terukur guna meningkatkan produktivitas dan profesionalisme. Dalam rangka memastikan efektivitas tersebut, pelaksanaan analisis jabatan pada akhir tahun menjadi instrumen penting sebagai bahan evaluasi terhadap tingkat produktivitas dan kesesuaian beban kerja pegawai, dimana hasil evaluasi tersebut akan disampaikan dalam laporan kinerja akhir tahun. Hasil analisis jabatan tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam penyempurnaan penataan SDM, baik dari sisi jumlah, kualitas, maupun distribusinya. Dengan demikian, pengelolaan SDM diharapkan semakin optimal, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan organisasi ke depan.

1.5 Isu Strategis

Isu strategis yang terjadi di wilayah kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II merupakan hasil rumusan yang didasarkan pada identifikasi masalah terkait kondisi permasalahan perumahan dan kawasan permukiman yang memiliki dampak signifikan apabila tidak segera ditangani. Di sisi lain, isu strategis juga dapat memuat potensi dalam penyelenggaraan perumahan yang tidak akan mencapai titik optimal apabila tidak segera dikembangkan. Isu strategis menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan rencana karena menjadi salah satu acuan dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan.

Isu Strategis di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II beberapa diantaranya yaitu:

1. **Tingginya Angka *Backlog* Perumahan**, kondisi *backlog* perumahan di Indonesia saat ini terbagi menjadi dua dimensi *backlog* yang cukup krusial, yaitu *backlog* kepemilikan dan *backlog* kualitas atau kelayakan. *Backlog* kepemilikan menunjukkan rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri, sementara *backlog* kualitas menunjukkan rumah tangga yang tinggal di hunian yang tidak memenuhi standar kelayakan. Tingginya *backlog* kepemilikan menandakan masih banyak keluarga yang belum memiliki rumah sendiri dan bertempat tinggal dengan cara menumpang, mengontrak rumah, atau menempati hunian tanpa status hukum yang sah. Sementara itu, *backlog* kualitas atau *backlog* kelayakan menunjukkan rumah tangga dengan tempat tinggal yang tidak layak secara standar teknis, kesehatan, maupun lingkungan hidupnya. Berikut adalah jumlah *backlog* kepemilikan di wilayah kerja BP3KP Kalimantan II.

Tabel 1.5 Data *Backlog* Kepemilikan di Wilayah Kerja BP3KP Kalimantan II

No	Provinsi	Jumlah KK
1	Kalimantan Timur	176.555
2	Kalimantan Selatan	30.124
3	Kalimantan Utara	162.569
Jumlah		369.248

Sumber: <https://my.pkp.go.id/>

2. **Masih Banyaknya Rumah Tidak Layak Huni**, selain *backlog* kepemilikan rumah, kualitas hunian juga menjadi isu penting. Masih banyak rumah yang belum memenuhi standar kelayakan hunian, baik dari aspek struktur bangunan, kesehatan lingkungan, maupun ketersediaan fasilitas dasar. Secara nasional, *backlog* renovasi atau rumah tidak layak huni diperkirakan mencapai sekitar 26 juta unit, sehingga diperlukan upaya peningkatan kualitas hunian melalui berbagai program rehabilitasi rumah dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Tabel 1.6 Data Backlog RTLH di Wilayah Kerja BP3KP Kalimantan II

No	Provinsi	Jumlah KK
1	Kalimantan Timur	284.729
2	Kalimantan Selatan	36.340
3	Kalimantan Utara	97.002
Jumlah		418.071

Sumber: <https://my.pkp.go.id/>

3. **Keberadaan Kawasan Permukiman Kumuh**, permasalahan kawasan kumuh masih menjadi tantangan dalam pembangunan permukiman. Kawasan kumuh umumnya ditandai dengan kondisi hunian yang tidak layak, dimana tujuh aspek kekumuhan umumnya merujuk pada indikator dalam penilaian kawasan permukiman kumuh yaitu, kondisi bangunan gedung mencakup ketidakteraturan, kepadatan dan kualitas bangunan, kondisi dan aksesibilitas jalan di kawasan, ketersediaan dan akses air bersih, kemampuan saluran dalam mengalirkan air dan mencegah genangan, system sanitasi dan pembuangan limbah domestik, sistem pengumpulan dan pengangkutan sampah, serta ketersediaan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran. Dalam pelaksanaannya, balai berperan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, serta mendukung penyediaan data dan informasi sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam penanganan kawasan kumuh, berikut adalah luasan kawasan kumuh menurut kewenangan penanganan di wilayah kerja BP3KP Kalimantan II.

Tabel 1.7 Luasan Wilayah Kumuh Menurut Kewenangan di Wilayah Kerja BP3KP Kalimantan II

NO	PROVINSI/KOTA/KABUPATEN	LUAS PERMUKIMAN KUMUH			TOTAL
		PUSAT	PROVINSI	KAB/KOTA	
		>15 Ha	(10 - 15 Ha)	<10 Ha	
KALIMANTAN II		3.615,01	1.630,78	1.481,13	6.726,92
A	KALIMANTAN TIMUR	299,75	763,50	417,29	1.480,54
1	SAMARINDA	21,43	24,25	24,83	70,51
2	BALIKPAPAN	-	96,93	38,69	135,62
3	BONTANG	32,80	33,35	7,41	73,56
4	PASER	61,62	37,24	11,40	110,26
5	PPU	-	51,25	-	51,25
6	KUTAI KARTANEGARA	92,61	36,52	15,50	144,63
7	KUTAI TIMUR	32,40	258,53	196,23	487,16
8	KUTAI BARAT	40,82	178,20	5,60	224,62
9	BERAU	18,07	10,13	39,03	67,23
10	MAHAKAM ULU	-	37,10	78,60	115,70
B	KALIMANTAN SELATAN	2906,3	765,93	817,88	4.490,11
1	TAPIN	109,29	14,25	22,96	146,50
2	TANAH LAUT	1.269,18	98,46	110,85	1.478,49
3	TANAH BUMBU	214,75	34,63	40,51	289,89

NO	PROVINSI/KOTA/KABUPATEN	LUAS PERMUKIMAN KUMUH			TOTAL
		PUSAT	PROVINSI	KAB/KOTA	
		>15 Ha	(10 - 15 Ha)	<10 Ha	
4	TABALONG	-	182,75	90,52	273,27
5	KOTA BARU	57,75	-	60,60	118,35
6	HULU SUNGAI UTARA	16,83	40,97	36,52	94,32
7	HULU SUNGAI TENGAH	168,80	84,56	46,94	300,30
8	HULU SUNGAI SELATAN	89,57	34,41	12,22	136,20
9	BARITO KUALA	505,69	38,55	74,11	618,35
10	BANJARMASIN	230,15	105,67	174,71	510,53
11	BANJAR BARU	55,79	-	16,06	71,85
12	BANJAR	117,33	107,11	119,54	343,98
13	BALANGAN	71,17	24,57	12,34	108,08
C	KALIMANTAN UTARA	408,958	101,35	245,961	756,27
1	TARAKAN	-	-	22,66	22,66
2	TANA TIDUNG	51,69	87,09	150,32	289,10
3	NUNUKAN	146,6	14,26	43,72	204,58
4	MALINAU	25,08	0	11,38	36,46
5	BALANGAN	185,588	0	17,881	203,47

Sumber: Data BP3KP Kalimantan II Tahun 2026

4. **Keterbatasan Akses Informasi Pembiayaan Perumahan**, sebagian masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) belum mengetahui bantuan pembiayaan perumahan. Tingginya harga rumah, keterbatasan kemampuan finansial masyarakat, serta keterbatasan skema pembiayaan yang terjangkau menjadi tantangan dalam upaya penyediaan hunian yang inklusif. Tugas balai sebagai UPT Kementerian PKP dalam menjalankan tugas untuk menjadi fasilitator yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat di seluruh wilayah kerja BP3KP Kalimantan II mencakup provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara, untuk memberikan informasi bantuan pembiayaan perumahan guna mendukung perencanaan program perumahan seperti program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) dan bantuan perbaikan rumah. Program FLPP bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memiliki rumah pertama, mengakses kredit pemilikan rumah (KPR) dengan bunga tetap dan rendah, serta mendapatkan tenor panjang hingga 20 tahun.
5. **Belum Optimalnya Sinergi Antar Pemangku Kepentingan**, Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, maupun masyarakat. Namun, koordinasi dan sinergi antar pihak tersebut masih perlu ditingkatkan agar pembangunan dapat dilaksanakan secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

6. **Tantangan Penataan Ruang dan Pemanfaatan Lahan**, Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi yang cukup pesat menyebabkan meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman, khususnya di wilayah perkotaan. Keterbatasan lahan serta belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dapat memicu berkembangnya permukiman tidak terencana yang berpotensi menimbulkan kawasan kumuh.

BAB 2

Perencanaan Kinerja

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kalimantan II

Tahun Anggaran
2026



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Penetapan Target Kinerja

Target Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Kalimantan II Tahun 2026 disusun berdasarkan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan berdasarkan DIPA tersebut dibuat ke dalam Perjanjian Kinerja dengan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Perjanjian Kinerja ini dibuat sebagai tanggung jawab atas beban kerja yang diberikan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. BP3KP Kalimantan II dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut secara komprehensif dan selalu berkoordinasi dengan seluruh unit eselon I terkait.

Penetapan target kinerja pada prinsipnya bersifat dinamis dan dapat mengalami penyesuaian seiring dengan terjadinya pergeseran anggaran maupun perubahan prioritas kegiatan yang ditetapkan oleh organisasi. Kondisi tersebut umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor strategis, antara lain kebijakan pemerintah, kebutuhan program yang lebih mendesak, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Setiap perubahan yang terjadi selanjutnya diformalkan melalui mekanisme revisi DIPA sebagai dokumen penganggaran yang sah.

Sejalan dengan hal tersebut, penyesuaian target kinerja juga perlu dituangkan kembali dalam dokumen Perjanjian Kinerja Revisi guna memastikan adanya keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja. Dengan demikian, proses revisi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian untuk menjaga konsistensi pencapaian sasaran organisasi secara terukur, akuntabel, dan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretariat Jenderal Kementerian PKP Nomor 167/ND/Sj.01/2026, untuk penetapan Target Kinerja serta Anggaran merujuk pada dokumen DIPA yang terbit setelah revisi RO khusus. Sehubungan dengan hal tersebut dasar dari penyusunan Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dengan seluruh Unit Organisasi Kementerian PKP merujuk pada DIPA Revisi ke 1 untuk seluruh DIPA yang diampu oleh BP3KP Kalimantan II, dan untuk Perjanjian Kinerja Revisi ke 1 BP3KP Kalimantan II dan seluruh Unit Organisasi terkait merujuk pada DIPA Revisi ke 2. Dikarenakan pada saat penyusunan Dokumen Rencana Aksi ini telah dilakukan 2 kali Revisi DIPA, berikut adalah kronologi revisi DIPA dan disertai revisi Perjanjian Kinerja.

Tabel 2.1 Kronologi Revisi Dokumen

No	Dokumen	Tanggal Awal	Tanggal Revisi ke 1	Tanggal Revisi ke 2
1	DIPA Sekretariat Jenderal	01/12/2025	29/12/2025	-
	Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dan Sekretariat Jenderal	10/04/2026	-	-
2	DIPA Ditjen Kawasan Permukiman	01/12/2025	29/12/2025	18/02/2026
	Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dan Ditjen Kawasan Permukiman	30/03/2026	30/03/2026	-
3	DIPA Ditjen Perdesaan	01/12/2025	29/12/2025	13/02/2026
	Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dan Ditjen Perdesaan	02/04/2026	02/04/2026	-
4	DIPA Ditjen Perkotaan	01/12/2025	29/12/2025	13/02/2026
	Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dan Ditjen Perkotaan	30/03/2026	30/03/2026	-
5	DIPA Ditjen TKPR	01/12/2025	29/12/2025	-
	Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dan Ditjen TKPR	28/01/2026	-	-

Sumber: DIPA BP3KP Kalimantan II dan Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II

Dalam proses penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2026 terjadi keterlambatan yang disebabkan oleh adanya proses penyesuaian terhadap kebijakan dan target kinerja yang masih dalam tahap finalisasi, baik di tingkat unit kerja maupun unit organisasi di atasnya. Selain itu, keterlambatan juga dipengaruhi oleh proses koordinasi dan sinkronisasi data kinerja yang memerlukan waktu lebih lama guna memastikan keselarasan antara indikator, target, dan alokasi anggaran yang ditetapkan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Awal dan Perjanjian Kinerja Revisi BP3KP Kalimantan II dengan seluruh Unit Organisasi terkait disertai dengan DIPA yang menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja tersebut.

A. DIPA Sekretariat Jenderal

Target kinerja yang tertuang dalam DIPA Revisi ke 1 Sekretariat Jenderal menjadi dasar penetapan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Sekretariat Jenderal, dan pada pelaksanaannya Perjanjian Kinerja Awal ini menjadi indikator kinerja dalam menjalankan target pada kegiatan BP3KP Kalimantan II DIPA Sekretariat Jenderal. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan target pada pelaksanaan kegiatan pada DIPA Sekretariat Jenderal dapat berubah seiring dengan terjadinya perubahan target dan pagu anggaran dengan terbitnya DIPA Revisi yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Revisi. Berikut adalah Target Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Sekretariat Jenderal yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada DIPA Sekretariat Jenderal.

Tabel 2.2 Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Sekretariat Jenderal

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	1	Jumlah Layanan Umum	5	Layanan
			Satker Balai	1	Layanan
			Satker PKP Kaltim	1	Layanan
			Satker PKP Kalsel	1	Layanan
			Satker PKP Kaltara	1	Layanan
			Satker PKP IKN	1	Layanan
		2	Jumlah Layanan Perkantoran	5	Layanan
			Satker Balai	1	Layanan
			Satker PKP Kaltim	1	Layanan
			Satker PKP Kalsel	1	Layanan
			Satker PKP Kaltara	1	Layanan
			Satker PKP IKN	1	Layanan
		3	Jumlah Layanan Sarana Internal	21	Unit
			Satker Balai	1	Unit
			Satker PKP Kaltim	1	Unit
			Satker PKP Kalsel	10	Unit
			Satker PKP Kaltara	1	Unit
			Satker PKP IKN	8	Unit
NO	SATUAN KERJA	PAGU			
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	Rp 1.312.809.000,00			
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur	Rp 573.479.000,00			
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan	Rp 699.472.000,00			
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara	Rp 768.377.000,00			
5	Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara	Rp 1.112.116.000,00			
TOTAL		Rp 4.466.253.000,00			

Sumber: Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Sekretariat Jenderal


 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.01.1.691412/2026**



05.6237-7094-1905-6796

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 01

Tanggal : 29 Desember 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|---------------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (146) | KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2. Unit Organisasi | : (01) | SEKRETARIAT JENDERAL |
| 3. Provinsi | : (16) | KALIMANTAN TIMUR |
| 4. Kode/Nama Sektir | : (691412) | Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II |
| Sebesar | : Rp. 1.312.809.000 | (SATU MILIAR TIGA RATUS DUA BELAS JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

 Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
 06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

 146.01.WA Program Dukungan Manajemen
 146.01.WA Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	1.312.809.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0	Jumlah Uang	Rp.	1.312.809.000
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0		Rp.	1.312.809.000
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0			
			5. Hibah Langsung	Rp.	0			
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0			
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0			
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0			

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-------------------|-----------|---------------|
| 1. KPPN SAMARINDA | (046) Rp. | 1.312.809.000 |
|-------------------|-----------|---------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini diotak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengemon berupa digital stamp sebagai penganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sektor dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

 Jakarta, 01 Desember 2025
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

 ttd.
 LUKY ALFIRMAN
 NIP. 197003271995031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 146.01.1.691412/2026
I A. INFORMASI KINERJA**



05.6237-7094-1905-6796

 Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
 Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
 Kode/Nama Sektir : (691412) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : I A. 1

Program	: 146.01.WA	Program Dukungan Manajemen				1.312.809.000
Kegiatan	: 7665	Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal				1.312.809.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output	1	7665.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit		1.127.470.000
Rincian Output		01 EBA.962 Layanan Umum	1.00	Layanan		49.208.000
		02 EBA.994 Layanan Perkantoran	1.00	Layanan		1.078.262.000
Klasifikasi Rincian Output	2	7665.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1.00	Unit, m2, Paket		185.339.000
Rincian Output		01 EBB.951 Layanan Sarana Internal	1.00	Unit		185.339.000

 Jakarta, 01 Desember 2025
 A.N. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 SEKRETARIS JENDERAL

 ttd.
 DIDYK CHOIROEL
 NIP. 197104181992011001

Gambar 2.1 DIPA Revisi ke 1 Sekretariat Jenderal


 KEMENTERIAN PERUMAHAN
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mustofa Otfan**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choiroel**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 April 2026

Pihak Kedua



Didyk Choiroel

NIP. 19710416 199201 1 001

Pihak Pertama



Mustofa Otfan

NIP. 19830318 200901 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	1 Jumlah Layanan Umum	5 Layanan
		2 Jumlah Layanan Perkantoran	5 Layanan
		3 Jumlah Layanan Sarana Internal	21 Unit

KEGIATAN

- 1 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
- 2 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur
- 3 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan
- 4 Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara
- 5 Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara

PAGU APBN

Rp	1.312.809.000,00
Rp	573.479.000,00
Rp	699.472.000,00
Rp	768.377.000,00
Rp	1.112.116.000,00
Rp	4.466.253.000,00

Jakarta, 10 April 2026

SEKRETARIS JENDERAL



DIDYK CHOIROEL

**KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II**



MUSTOFA OTFAN

Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja BP3KP Kalimantan II dan Sekretariat Jenderal

B. DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Target kinerja yang tertuang dalam DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman menjadi dasar penetapan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Revisi ke 1 BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman. Pada pelaksanaannya DIPA Ditjen KP telah mengalami dua kali revisi yaitu Revisi ke 1 pada tanggal 29 Desember 2025 dan DIPA Revisi ke 2 pada tanggal 18 Februari 2026. Sehubungan dengan hal tersebut Perjanjian Kinerja DIPA Ditjen KP telah mengalami satu kali revisi sehingga terdapat Perjanjian Kinerja Awal dan Perjanjian Kinerja Revisi ke 1, Perjanjian Kinerja Revisi ke 1 inilah yang menjadi indikator kinerja dalam menjalankan target pada kegiatan BP3KP Kalimantan II pada DIPA Ditjen KP. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan target pada pelaksanaan kegiatan pada DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dapat berubah seiring dengan terjadinya perubahan target dan pagu anggaran dengan terbitnya DIPA Revisi yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Revisi selama tahun anggaran berjalan. Berikut adalah Target Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Revisi ke 1 BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, disampaikan juga DIPA Revisi ke 1 dan PK Awal Ditjen KP sebagai kronologi perubahan anggaran beserta target.

Tabel 2.3 Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman					
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1	Dokumen
		2	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1	Dokumen
Program Dukungan Manajemen					
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	1	Jumlah Layanan Umum	5	Layanan
			Satker Balai	1	Layanan
			Satker PKP Kaltim	1	Layanan
			Satker PKP Kalsel	1	Layanan
			Satker PKP Kaltara	1	Layanan
			Satker PKP IKN	1	Layanan
		2	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1	Layanan
3	Jumlah BMN	1	Layanan		

NO	SATUAN KERJA	PAGU
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	Rp 371.045.000
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur	Rp 47.757.000,00
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan	Rp 24.637.000,00
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara	Rp 45.471.000,00
5	Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara	Rp 55.421.000,00
Total		Rp 544.331.000,00

Sumber: Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691466/2026



05.3022-6390-7078-9160

Revisi ke 01
 Tanggal : 29 Desember 2025

A. Dasar Hukum:
 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:
 1. Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 2. Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
 3. Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
 4. Kode/Nama Saker : (691466) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
 Sebesar : Rp. 371.045.000 (TIGA RATUS TUJUH PULUH SATU JUTA EMPAT PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
 Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

		Terlampir	Terlampir	Jumlah Uang
C. Sumber Dana Berasal Dari :				
1. Rujiah Murni	Rp.	371.045.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp. 0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp. 0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp. 0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp. 0
	Rp.	0	6. SBN PBS	Rp. 0
D. Pencairan dana dilakukan melalui :				
1. KPPN SAMARINDA	(046) Rp.	371.045.000		
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)				
1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjut dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.				

Jakarta, 01 Desember 2025
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

 ttd
 LUKY ALFIRMAN
 NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 146.03.1.691466/2026
I.A. INFORMASI KINERJA



05.3022-6390-7078-9160

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
 Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
 Kode/Nama Saker : (691466) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : I.A. 1

Program	: 146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		269.129.000
Kegiatan	: 7059	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman		269.129.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:			
Klasifikasi Rincian Output 1	: 7059.BMA	Data dan Informasi Publik	1,00	dokumen, Peta, Data
Rincian Output	: 01	BMA.001 Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1,00	dokumen
Klasifikasi Rincian Output 2	: 7059.CBR	Dukungan Teknis	1,00	Dokumen
Rincian Output	: 01	CBR.002 Dukungan Teknis Penyisipan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1,00	Dokumen
Klasifikasi Rincian Output 3	: 7059.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	1,00	Rekomendasi Kebijakan
Rincian Output	: 01	PBF.001 Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan
Program	: 146.03.WA	Program Dukungan Manajemen		101.916.000
Kegiatan	: 7074	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman		101.916.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:			
Klasifikasi Rincian Output 1	: 7074.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit
Rincian Output	: 01	EBA.902 Layanan Umum	1,00	Layanan
	: 02	EBA.903 Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan
	: 03	EBA.206 Layanan BMN	1,00	Layanan

Jakarta, 01 Desember 2025
 a.n. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

 ttd
 Ir. Fitrah Nur, M.Si
 NIP. 196704191994031003

Gambar 2.3 DIPA Revisi ke 1 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman


 KEMENTERIAN PERUMAHAN
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN

AWAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mustofa Otfan**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**
 Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Fitrah Nur
 NIP. 19670419 199403 1 003

Jakarta, 30 Maret 2026

Pihak Pertama


Mustofa Otfan
 NIP. 19830318 200901 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II

DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni.	1. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Dokumen
		2. Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1. Jumlah Dokumen Teknik Penetapan Pemukiman Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 Dokumen
Program Dukungan Manajemen			
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	1. Jumlah Layanan Urutan	5 Layanan
		2. Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan
		3. Jumlah Layanan BMN	1 Layanan

KEGIATAN

1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	Rp 371.045.000,00
2. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur	Rp 47.757.000,00
3. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan	Rp 24.637.000,00
4. Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara	Rp 45.471.000,00
5. Perumahan dan Kawasan Permukiman DKI Nusantara*	Rp 55.421.000,00
	Rp 544.331.000,00

Jakarta, 30 Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN


Fitrah Nur

KAPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II


MUSTOFA OTFAN

Gambar 2.4 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Tabel 2.4 Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Revisi ke 1 BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1. Dokumen
		2. Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Rekomendasi Kebijakan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
2	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan yang terlayani PSU kawasan permukiman	1	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Lahan dan Fasilitasi PSU	1	Dokumen
		2	Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	60	Unit
3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1	Dokumen
		2	Jumlah Unit Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	900	Unit
			Satker PKP Kaltim	300	Unit
			Satker PKP Kalsel	600	Unit
Program Dukungan Manajemen					
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	1	Jumlah Layanan Umum	5	Layanan
		2	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1	Layanan
		3	Jumlah BMN	1	Layanan
NO	SATUAN KERJA	PAGU			
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	Rp 531.045.000,00			
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur	Rp 6.755.484.000,00			
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan	Rp 14.249.835.000,00			
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara	Rp 45.471.000,00			
5	Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara	Rp 55.421.000,00			
Total		Rp 21.637.256.000,00			

Sumber: Perjanjian Kinerja Revisi ke 1 BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.03.1.691466/2026



03.3079-0048-0020-2566

Revisi ke 02
 Tanggal : 18 Februari 2026

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (03)	DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
3. Provinsi	: (16)	KALIMANTAN TIMUR
4. Kode/Nama Satker	: (691466)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Sebesar	: Rp. 531.045.000	(LIMA RATUS TIGA PULUH SATU JUTA EMPAT PULUH LIMA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	531.045.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNPB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. S&SN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SAMARINDA	(046) Rp.	531.045.000
-------------------	-----------	-------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini diotak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
 LUKY ALFIRMAN
 NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026 NOMOR : DIPA- 146.03.1.691466/2026 I A. INFORMASI KINERJA					
					
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR Kode/Nama Satker : (691466) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II					
					Halaman : I A. 1
Program	: 146.03.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			429.129.000
Kegiatan	: 7659	Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman			429.129.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:				
Klasifikasi Rincian Output 1	: 7659.BMA	Data dan Informasi Publik	1,00	dokumen, Peta, Data	36.910.000
Rincian Output	: 01 BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1,00	dokumen	36.910.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 7659.CBR	Dukungan Teknis	2,00	Dokumen	275.467.000
Rincian Output	: 01 CBR.001	Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Fasilitas PSU	1,00	Dokumen	160.000.000
	: 02 CBR.002	Dukungan Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1,00	Dokumen	115.467.000
Klasifikasi Rincian Output 3	: 7659.PBF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	1,00	Rekomendasi Kebijakan	116.752.000
Rincian Output	: 01 PBF.001	Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	116.752.000
Program	: 146.03.WA	Program Dukungan Manajemen			101.916.000
Kegiatan	: 7674	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Kawasan Permukiman			101.916.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:				
Klasifikasi Rincian Output 1	: 7674.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	101.916.000
Rincian Output	: 01 EBA.962	Layanan Umum	1,00	Layanan	59.574.000
	: 02 EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan	15.342.000
	: 03 EBA.206	Layanan BMN	1,00	Layanan	27.000.000

Jakarta, 01 Desember 2025
 a.n. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
 ttd.
 Ir. Fitrah Nur, M.Si
 NIP. 196704191994031003

Gambar 2.5 DIPA Revisi ke 2 Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mustofa Otfan**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Fitrah Nur**
 Jabatan : Direktur Jenderal Kawasan Permukiman

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Maret 2026

Pihak Kedua



Fitrah Nur
NIP. 196704191994031003

Pihak Pertama



Mustofa Otfan
NIP. 198303182009011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026			
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II			
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN			
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemiskinan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	1. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Dokumen
		2. Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi persiapan lahan dan penemuan yang terlayani PSU kawasan permukiman	1. Jumlah Dokumen Teknis Persiapan Lahan dan Fasilitasi PSU	1 Dokumen
		2. Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	60 Unit
3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman	1. Jumlah Dokumen Teknis Persiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 Dokumen
		2. Jumlah Unit Rumah Swadaya melalui Peningkatan Kualitas	900 Unit
Program Dukungan Manajemen			
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	1. Jumlah Layanan Umum	5 Layanan
		2. Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan
		3. Jumlah Layanan BMN	1 Layanan
KEGIATAN		PAGU APBN	
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	Rp	831.045.000,00
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur	Rp	6.755.484.000,00
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan	Rp	14.249.835.000,00
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara	Rp	45.471.000,00
5	Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara*	Rp	85.421.000,00
		Rp	21.637.236.000,00
		Jakarta, 30 Maret 2026	
DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN		KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II	
			
FITRAH NUR		MUSTOFA OTMAN	

Gambar 2.6 Perjanjian Kinerja Revisi ke 1 BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

C. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Target kinerja yang tertuang dalam DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menjadi dasar penetapan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Revisi ke 1 BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Pada pelaksanaannya DIPA Ditjen Perdesaan telah mengalami dua kali revisi yaitu Revisi ke 1 pada tanggal 29 Desember 2025 dan DIPA Revisi ke 2 pada tanggal 13 Februari 2026. Sehubungan dengan hal tersebut Perjanjian Kinerja DIPA Ditjen Perdesaan telah mengalami satu kali revisi sehingga terdapat Perjanjian Kinerja Awal dan Perjanjian Kinerja Revisi ke 1, Perjanjian Kinerja Revisi ke 1 inilah yang menjadi indikator kinerja dalam menjalankan target pada kegiatan BP3KP Kalimantan II pada DIPA Ditjen Perdesaan. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan target pada pelaksanaan kegiatan pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dapat berubah seiring dengan terjadinya perubahan target dan pagu anggaran dengan terbitnya DIPA Revisi yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Revisi selama tahun anggaran berjalan. Berikut adalah Target Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Revisi ke 1 BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, disampaikan juga DIPA Revisi ke 1 dan PK Awal Ditjen Perdesaan sebagai kronologi perubahan anggaran beserta target.

Tabel 2.5 Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman					
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Rekomendasi Kebijakan
		2	Jumlah Dokumen Data dan Infomasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Dokumen
		3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	4	Laporan
			Satker Balai	1	Laporan
			Satker PKP Kaltim	1	Laporan
			Satker PKP Kalsel	1	Laporan
			Satker PKP Kaltara	1	Laporan
2	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan	1	Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan	1	Dokumen
		2	Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perdesaan	1	Dokumen
3	Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan	1	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	1	Kegiatan
4	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan Perdesaan	1	Laporan
		2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1	Rekomendasi Kebijakan
5	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1	Rekomendasi Kebijakan
Program Dukungan Manajemen					
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	1	Jumlah Layanan Umum	4	Layanan
			Satker Balai	1	Layanan
			Satker PKP Kaltim	1	Layanan
			Satker PKP Kalsel	1	Layanan
			Satker PKP Kaltara	1	Layanan
2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1	Layanan
SATUAN KERJA			PAGU		
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II		Rp 699.072.000,00		
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur		Rp 59.177.000,00		
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan		Rp 46.341.000,00		
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara		Rp 42.626.000,00		
TOTAL			Rp 847.216.000,00		

Sumber: Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691520/2026



05 2052 5056 4000 0126

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. UU No. 17 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan.

3. UU No. 17 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

Revisi ke 01
 Tanggal : 29 Desember 2025

B. Dengan ini disahkan Anggaran Urut:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (04)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsi	: (18)	KALIMANTAN TIMUR
4. Kode Nama Satker	: (691520)	Badan Pelaksana Penyelidikan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Selancar	: Rp.	699.072.000 (ENAM RATUS SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Urut kegiatan kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	699.072.000	4. Program/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Program Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Program/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Program/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
	Rp.	0	6. SBN PBS	Rp.	0

D. Pencarian dana dibuktikan melalui :

1. IPPK SAMANINDA (046) Rp. 699.072.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga);

2. DIPA Petikan ini diadopsi secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (jeleklikas);

3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencarian dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara;

4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penempatan yang tercantum dalam Halaman III DIPA ditiru sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan;

5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L, DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada);

7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

Bd.
 LUKY ALFIRMAN
 NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691520/2026
I A. INFORMASI KINERJA



05 2052 5056 4000 0126

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

Provinsi : (18) KALIMANTAN TIMUR

Kode Nama Satker : (691520) Badan Pelaksana Penyelidikan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Program		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		Halaman : I A. 1	
Kegiatan	: 7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan			675.128.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah unit rumah baru yang terbangun di pedesaan			675.128.000
	2. 02	Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya di pedesaan			
	3. 03	Jumlah unit rumah yang diageni bantuan PSU di pedesaan			
	4. 04	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan			
	5. 07	Terciptanya lingkungan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen			
Klasifikasi Rincian Output	1 : 7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	3,00	Rekomendasi Kebijakan	388.162.000
Rincian Output	: 01 ABF.007	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	40.522.000
	02 ABF.008	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	197.875.000
	03 ABF.009	Kebijakan Kemiskinan, Stagnasi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	159.765.000
Klasifikasi Rincian Output	2 : 7660.BMA	Data dan Informasi Publik	1,00	dokumen, Peta, Data	61.838.000
Rincian Output	: 01 BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1,00	dokumen	61.838.000
Klasifikasi Rincian Output	3 : 7660.CBR	Dukungan Teknis	2,00	Dokumen	69.881.000
Rincian Output	: 01 CBR.001	Dukungan Teknis Penyajian Lahan dan Potensi Perumahan Perdesaan	1,00	Dokumen	43.227.000
	02 CBR.002	Dukungan Teknis Penghuni Perumahan Perdesaan	1,00	Dokumen	26.654.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691520/2026
I A. INFORMASI KINERJA



05 2052 5056 4000 0126

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

Provinsi : (18) KALIMANTAN TIMUR

Kode Nama Satker : (691520) Badan Pelaksana Penyelidikan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Klasifikasi Rincian Output		Klasifikasi Rincian Output		Halaman : I A. 2	
Rincian Output	: 01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	2,00	Laporan, Layanan	115.579.000
	02 FAE.004	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1,00	Laporan	82.188.000
		Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1,00	Laporan	33.361.000
Klasifikasi Rincian Output	5 : 7660.PEA	Koordinasi	1,00	kegiatan	29.868.000
Rincian Output	: 01 PEA.001	Koordinasi dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan Perdesaan	1,00	kegiatan	29.868.000
Program	: 146.04.WA	Program Dukungan Manajemen			23.944.000
Kegiatan	: 7675	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan			23.944.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:				
Klasifikasi Rincian Output	1 : 7675.CBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit Layanan	23.944.000
Rincian Output	: 01 EBA.962	Layanan Umum	1,00	Layanan	14.366.000
	02 EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan	9.578.000

Jakarta, 01 Desember 2025
 a.n. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Bd.
 Dr. Drs. Irfan, M.Si., MA.Cd.
 197910281995021001

Gambar 2.7 DIPA Revisi ke 1 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

AWAL


 KEMENTERIAN PERUMAHAN
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mustofa Otfan**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Imran**
 Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Imran
 NIP. 19731026 199302 1 001

Jakarta, 02 April 2026

Mustofa Otfan
 NIP. 19830318 200901 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan 2. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan 3. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1. Rekomendasi Kebijakan 1. Dokumen 4. Laporan
2	Meningkatnya akses pelayanan lahan, perizinan dan pengurusan perumahan di wilayah perdesaan	1. Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penyajian Lahan dan Perizinan Perumahan Perdesaan 2. Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penghuni Perumahan Perdesaan	1. Dokumen 1. Dokumen
3	Meningkatnya akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan	1. Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan Perdesaan	1. Kegiatan
4	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	1. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan Perdesaan 2. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1. Laporan 1. Rekomendasi Kebijakan
5	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1. Rekomendasi Kebijakan
Program Dukungan Manajemen			
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	1. Jumlah Layanan Umum	4. Layanan
2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1. Jumlah Layanan Data dan Informasi	1. Layanan
KEGIATAN			
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	Rp	699.072.000,00
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur	Rp	99.177.000,00
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan	Rp	46.341.000,00
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara	Rp	42.626.000,00
		Rp	847.216.000,00


IMRAN

Jakarta, 02 April 2026
KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II

MUSTOFA OTFAN

Gambar 2.8 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Tabel 2.6 Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Revisi ke 1 BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1. Rekomendasi Kebijakan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET	
		2	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Dokumen
		3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	3	Laporan
			Satker PKP Kaltim	1	Laporan
			Satker PKP Kalsel	1	Laporan
			Satker PKP Kaltara	1	Laporan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan Perdesaan	1	Laporan
		2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1	Rekomendasi Kebijakan
3	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1	Rekomendasi Kebijakan
		2	Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	5400	Unit
			Satker PKP Kaltim	1800	Unit
			Satker PKP Kalsel	2700	Unit
			Satker PKP Kaltara	900	Unit
Program Dukungan Manajemen					
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	1	Jumlah Layanan Umum	4	Layanan
			Satker Balai	1	Layanan
			Satker PKP Kaltim	1	Layanan
			Satker PKP Kalsel	1	Layanan
	Satker PKP Kaltara	1	Layanan		
2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1	Layanan
NO	SATUAN KERJA	PAGU			
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	Rp 382.014.000,00			
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur	Rp 39.752.786.000,00			
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan	Rp 58.857.442.000,00			
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara	Rp 20.097.176.000,00			
Total		Rp 119.089.418.000,00			

Sumber: Perjanjian Kinerja Revisi ke 1 BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan


 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.04.1.691520/2026**



05.0436-9106-3035-3506

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

Revisi ke 02

Tanggal : 13 Februari 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	:	(04)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
3. Provinsi	:	(16)	KALIMANTAN TIMUR
4. Kode/Nama Satker	:	(691520)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Sebesar	:	Rp. 382.014.000	(TIGA RATUS DELAPAN PULUH DUA JUTA EMPAT BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir

Jumlah Uang

Terlampir
C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	382.014.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencatatan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SAMARINDA	(046) Rp.	382.014.000
-------------------	-----------	-------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dibuat secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan selanjutnya dan pencatatan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diuji sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

 Jakarta, 01 Desember 2025
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

 ttd.
 LUKY ALFIRMAN
 NIP. 197003271995031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 146.04.1.691520/2026
I.A. INFORMASI KINERJA**



05.0436-9106-3035-3506

 Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN
 Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
 Kode/Nama Satker : (691520) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

						Halaman : I.A. 1
Program	:	146.04.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			358.070.000
Kegiatan	:	7660	Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan			358.070.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7660.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	3,00	Rekomendasi Kebijakan	292.075.000
Rincian Output	:	01	ABF.007 Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	24.000.000
	:	02	ABF.008 Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	123.799.000
	:	03	ABF.009 Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	144.276.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7660.BMA	Data dan Informasi Publik	1,00	dokumen, Peta, Data	48.595.000
Rincian Output	:	01	BMA.001 Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1,00	dokumen	48.595.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7660.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	17.400.000
Rincian Output	:	01	FAE.004 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1,00	Laporan	17.400.000
Program	:	146.04.WA	Program Dukungan Manajemen			23.944.000
Kegiatan	:	7675	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan			23.944.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7675.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	23.944.000
Rincian Output	:	01	EBA.962 Layanan Umum	1,00	Layanan	14.366.000
	:	02	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan	9.578.000

 Jakarta, 01 Desember 2025
 a.n. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

 ttd.
 Dr. Drs. Imran, M.Si., MA Cd.
 197310261993021001

Gambar 2.9 DIPA Revisi ke 2 Dierktorat Jenderal Perumahan Perdesaan


**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Revisi ke 01

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mustofa Otfan**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

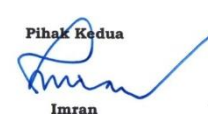
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Imran**
 Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Imran
 NIP. 19731026 199302 1 001

Jakarta, 02 April 2026

Mustofa Otfan
 NIP. 19830318 200901 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1. Rekomendasi Kebijakan
		2. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1. Dokumen
		3. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	3. Laporan
2	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan	1. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan Perdesaan	1. Laporan
		2. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1. Rekomendasi Kebijakan
3	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan	1. Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1. Rekomendasi Kebijakan
		2. Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	5400 Unit
Program Dukungan Manajemen			
1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	1. Jumlah Layanan Umum	4. Layanan
2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1. Jumlah Layanan Data dan Informasi	1. Layanan
KEGIATAN		PAGU APBN	
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	Rp	382.014.000,00
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur	Rp	39.752.785.000,00
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan	Rp	58.857.442.000,00
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara	Rp	20.997.176.000,00
		Rp	119.089.418.000,00


IMRAN
DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN

Jakarta, 02 April 2026

MUSTOFA OTFAN
KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II

Gambar 2.10 Perjanjian Kinerja Revisi ke 1 BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

D. DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Target kinerja yang tertuang dalam DIPA Revisi ke 2 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan menjadi dasar penetapan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Revisi ke 1 BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Pada pelaksanaannya DIPA Ditjen Perkotaan telah mengalami dua kali revisi yaitu Revisi ke 1 pada tanggal 29

Desember 2025 dan DIPA Revisi ke 2 pada tanggal 13 Februari 2026. Sehubungan dengan hal tersebut Perjanjian Kinerja DIPA Ditjen Perkotaan telah mengalami satu kali revisi sehingga terdapat Perjanjian Kinerja Awal dan Perjanjian Kinerja Revisi ke 1, Perjanjian Kinerja Revisi ke 1 inilah yang menjadi indikator kinerja dalam menjalankan target pada kegiatan BP3KP Kalimantan II pada DIPA Ditjen Perkotaan. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan target pada pelaksanaan kegiatan pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dapat berubah seiring dengan terjadinya perubahan target dan pagu anggaran dengan terbitnya DIPA Revisi yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Revisi selama tahun anggaran berjalan. Berikut adalah Target Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Revisi ke 1 BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, disampaikan juga DIPA Revisi ke 1 dan PK Awal Ditjen Perkotaan sebagai kronologi perubahan anggaran beserta target.

Tabel 2.7 Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman				
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Jumlah Kebijakan, Strategi, dan Program Prioritas Penyelenggaraan perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	5 Laporan
			Satker Balai	1 Laporan
			Satker PKP Kaltim	1 Laporan
			Satker PKP Kalsel	1 Laporan
			Satker PKP Kaltara	1 Laporan
			Satker PKP IKN	1 Laporan
2	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
3	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
4	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1	Jumlah Unit Rumah Susun ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	1 Unit
		2	Jumlah Unit Rumah Susun MBR/Pekerja Perumahan	65 Unit
		3	Jumlah Unit Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) Perumahan Perkotaan	240 Unit
		4	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
5	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
Program Dukungan Manajemen				
1		1	Jumlah Layanan BMN dan Manajemen Keuangan	1 Layanan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	2	Jumlah Layanan Umum	4 Layanan
			Satker Balai	1 Layanan
			Satker PKP Kaltim	1 Layanan
			Satker PKP Kaltara	1 Layanan
			Satker PKP IKN	1 Layanan
		3	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan
KEGIATAN		PAGU APBN		
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	Rp 419.019.000,00		
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur	Rp 82.447.832.000,00		
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan	Rp 24.174.292.000,00		
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara	Rp 23.230.000,00		
5	Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara	Rp 51.814.768.000,00		
TOTAL		Rp 158.879.141.000,00		

Sumber: Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA - 146.05.1.691574/2026



DS 5168-0376-5050-5429

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
2. Unit Organisasi	: (05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN	
3. Provinsi	: (16)	KALIMANTAN TIMUR	
4. Kode/Nama Satker	: (691574)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	
Sebesar	: Rp.	419.019.000	(EMPAT RATUS SEMBILAN BELAS JUTA SEMBILAN BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
 Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupaiah Murni	Rp.	419.019.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :
 1. KPPN SAMARINDA (046) Rp. 419.019.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Revisi ke 01
 Tanggal : 29 Desember 2025

Jakarta, 01 Desember 2025
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
 LUKY ALFIRMAN
 NIP. 197003271995031002

DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 146.05.1.691574/2026
I A. INFORMASI KINERJA



05.3169-0376-6030-5429

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
 Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
 Kode/Nama Salur : (691574) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : I A. 1

Program	:	146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			328.163.000	
Kegiatan	:	7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			328.163.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	5,00	Rekomendasi Kebijakan	267.242.000
Rincian Output	:	01	ABF.001	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	63.184.000
		02	ABF.002	Kebijakan Penyelenggaraan Penyediaan Lahan, Perizinan dan Penghunan Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	41.584.000
		03	ABF.003	Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	44.292.000
		04	ABF.004	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	59.091.000
		05	ABF.005	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	59.091.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	60.921.000
Rincian Output	:	01	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1,00	Laporan	60.921.000
Program	:	146.05.WA	Program Dukungan Manajemen			90.856.000	
Kegiatan	:	7676	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			90.856.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	90.856.000
Rincian Output	:	01	EBA.956	Layanan BMN dan Manajemen Keuangan	1,00	Layanan	49.838.000
		02	EBA.962	Layanan Umum	1,00	Layanan	18.855.000
		03	EBA.963	Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan	22.163.000

Jakarta, 01 Desember 2025
 A.N. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

ttd.
 SRI HARYATI
 197107071997032004

Gambar 2.11 DIPA Revisi ke 1 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mustofa Otfan**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**
 Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Maret 2026

Pihak Kedua



Sri Haryati
 NIP. 197107071997032004

Pihak Pertama



Mustofa Otfan
 NIP. 198303182009011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1. Jumlah Kebijakan, Strategi, dan Program Prioritas Penyelenggaraan perumahan Perkotaan 2. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan 5 Laporan
2	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
3	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
4	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1. Jumlah Unit Rumah Susun ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	1 Unit
		2. Jumlah Unit Rumah Susun MBR/Pekerja Perumahan	65 Unit
		3. Jumlah Unit Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) Perumahan Perkotaan	240 Unit
		4. Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Penghunian Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
5	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1. Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
Program Dukungan Manajemen			
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1. Jumlah Layanan BMN dan Manajemen Keuangan 2. Jumlah Layanan Umum 3. Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan 4 Layanan 1 Layanan
KEGIATAN		PAGU APBN	
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	Rp	419.019.000,00
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur	Rp	82.447.832.000,00
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan	Rp	24.174.292.000,00
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara	Rp	23.230.000,00
5	Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara	Rp	51.814.768.000,00
		Rp	158.679.141.000,00
Jakarta, 30 Maret 2026 DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II			

Gambar 2.12 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Tabel 2.8 Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Revisi ke 1 BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1. Jumlah Kebijakan, Strategi, dan Program Prioritas Penyelenggaraan perumahan Perkotaan 2. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Satker Balai Satker PKP Kaltim Satker PKP Kalsel Satker PKP Kaltara Satker PKP IKN	1 Rekomendasi Kebijakan 5 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan
2	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
3	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
4	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1. Jumlah Unit Rumah Susun ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	44 Unit
		2. Jumlah Unit Rumah Susun MBR/Pekerja Perumahan	65 Unit
		3. Jumlah Unit Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) Perumahan Perkotaan	240 Unit

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		4	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
5	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1	Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	2100 Unit
			Satker PKP Kaltim	900 Unit
			Satker PKP Kalsel	600 Unit
			Satker PKP Kaltara	600 Unit
		2	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
Program Dukungan Manajemen				
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1	Jumlah Layanan BMN dan Manajemen Keuangan	1 Layanan
		2	Jumlah Layanan Umum	5 Layanan
			Satker Balai	1 Layanan
			Satker PKP Kaltim	1 Layanan
			Satker PKP Kalsel	1 Layanan
			Satker PKP Kaltara	1 Layanan
			Satker PKP IKN	1 Layanan
		3	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan
NO	SATUAN KERJA	PAGU		
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	Rp 375.415.000,00		
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur	Rp 101.945.596.000,00		
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan	Rp 37.150.504.000,00		
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara	Rp 12.866.534.000,00		
5	Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara*	Rp 51.814.768.000,00		
Total		Rp 204.152.817.000,00		

*Sesuai DIPA Revisi ke 3 yang terbit pada tanggal 13 Februari 2026

Sumber: Perjanjian Kinerja Revisi ke 1 BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA - 146.05.1.691574/2026



05.9043.6220.9805.7008

A. Dasar Hukum:

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. UU No. 17 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	: (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi	: (05)	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
3. Provinsi	: (16)	KALIMANTAN TIMUR
4. Kode Nama Sather	: (691574)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Sesuai	: Rp. 375.415.000	(TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA JUTA EMPAT RATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Revisi ke 02
 Tanggal : 13 Februari 2026

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupaiah Murni	Rp.	375.415.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBN/PS	Rp.	0

D. Pencatatan dana dilakukan melalui :

1. KPPN SAMARINDA	(046) Rp.	375.415.000
-------------------	-----------	-------------

Terlampir
Terlampir

Jumlah Uang

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencatatan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
 LUKY ALFIRMAN
 NIP. 19700327196001002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026 NOMOR : DIPA- 146.05.1.691574/2026 I A. INFORMASI KINERJA					
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR Kode Nama Satker : (691574) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II					
					Halaman : I A. 1
Program	: 146.05.1A	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			331.163.000
Kegiatan	: 7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			331.163.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah unit rumah baru yang terbangun di perkotaan			
	: 2. 02	Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya di perkotaan			
	: 3. 03	Jumlah unit rumah yang dilayani bantuan PSU di perkotaan			
	: 4. 04	Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi kemudahan perumahan			
	: 5. 05	Terceptanya peningkatan tata kelola hunian publik, privat dan perlindungan konsumen (Rekomendasi Kebijakan)			
Klasifikasi Rincian Output 1	: 7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	5,00	Rekomendasi Kebijakan	270.242.000
Rincian Output	: 01	ABF.001 Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	63.184.000
	: 02	ABF.002 Kebijakan Penyelenggaraan Penyediaan Lahan, Perizinan dan Penghunan Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	41.584.000
	: 03	ABF.003 Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	45.292.000
	: 04	ABF.004 Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	65.091.000
	: 05	ABF.005 Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1,00	Rekomendasi Kebijakan	55.091.000
Klasifikasi Rincian Output 2	: 7661.FAE	Pemerintahan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	60.921.000
Rincian Output	: 01	FAE.001 Pemerintahan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1,00	Laporan	60.921.000
Program	: 146.05.WA	Program Dukungan Manajemen			44.252.000
Kegiatan	: 7676	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			44.252.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:				

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2026 NOMOR : DIPA- 146.05.1.691574/2026 I A. INFORMASI KINERJA					
Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR Kode Nama Satker : (691574) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II					
					Halaman : I A. 2
Klasifikasi Rincian Output 1	: 7676.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	44.252.000
Rincian Output	: 01	EBA.962 Layanan Umum	1,00	Layanan	14.851.000
	: 02	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	1,00	Layanan	14.163.000
	: 03	EBA.206 Layanan BMN	1,00	Layanan	15.238.000

Jakarta, 01 Desember 2025
 A.N. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
 ttd.
 SRI HARYATI
 197107071997032004

Gambar 2.13 DIPA Revisi ke 2 Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Revisi ke 1


**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mustofa Otfan**
 Jabatan : **Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Sri Haryati**
 Jabatan : **Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
- Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Maret 2026

Pihak Kedua

Sri Haryati
 NIP. 19710707 199703 2 004

Pihak Pertama

Mustofa Otfan
 NIP. 19830318 200901 1 001

NO	BASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	Meningkatkan Kinerja Keterpaduan, Kemiripan, Pengorganisasian, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1. Jumlah Kegiatan, Strategi, dan Program Prioritas Penyelenggaraan perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kegiatan
2	Meningkatkan Akurasi Penyajian Laporan, Perencanaan dan Pengawasan Perumahan Perkotaan	2. Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	5 Laporan
3	Meningkatkan Akurasi Rumah Tangga yang Terfasilitasi Penyediaan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1. Jumlah Rekomendasi Kegiatan Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kegiatan
4	Meningkatkan Ketersediaan Rumah Suku Layak Hari di Perkotaan	1. Jumlah Rekomendasi Kegiatan Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kegiatan
5	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1. Jumlah Unit Rumah Suku Layak Hari di Perkotaan	44 Unit
6	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	2. Jumlah Unit Rumah Suku Layak Hari di Perkotaan	65 Unit
7	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	3. Jumlah Unit Rumah Suku Layak Hari di Perkotaan	240 Unit
8	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	4. Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kegiatan
9	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1. Jumlah Rekomendasi Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	2100 Unit
10	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	2. Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kegiatan
Program Dukungan Manajemen			
1	Meningkatkan Layanan Dukungan Manajemen	1. Jumlah Layanan BMD dan Manajemen Keuangan	1 Layanan
2	Meningkatkan Layanan Dukungan Manajemen	2. Jumlah Layanan Umum	5 Layanan
3	Meningkatkan Layanan Dukungan Manajemen	3. Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan
KEGIATAN			
1	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II	Rp	375.415.000,00
2	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur	Rp	101.945.596.000,00
3	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan	Rp	37.150.504.000,00
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Utara	Rp	12.866.524.000,00
5	Perumahan dan Kawasan Permukiman IKN Nusantara*	Rp	51.814.758.000,00
		Rp	304.182.817.000,00

Jakarta, 30 Maret 2026

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

SRI HARYATI
*Susut DIPA Rendah ke 2 yang akan pada tanggal 12 Februari 2026

KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II

MUSTOFA OTFAN

Gambar 2.14 Perjanjian Kinerja Revisi ke 1 BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

E. DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Target kinerja yang tertuang dalam DIPA Revisi ke 1 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko menjadi dasar penetapan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko, dan pada pelaksanaannya Perjanjian Kinerja Awal ini menjadi indikator kinerja dalam

menjalankan target pada kegiatan BP3KP Kalimantan II DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan target pada pelaksanaan kegiatan pada DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko dapat berubah seiring dengan terjadinya perubahan target dan pagu anggaran dengan terbitnya DIPA Revisi yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Revisi. Berikut adalah Target Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Tabel 2.9 Target Kinerja pada Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	2 Rekomendasi Kebijakan
3	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	1 Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	1 Laporan
KEGIATAN		PAGU APBN	
1	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp 170.115.000,00	
TOTAL		Rp 170.115.000,00	

Sumber: Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 146.06.1.691607/2026



05.1733-0741-9800-0152

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (146)	KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2. Unit Organisasi : (06)	DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
3. Provinsi : (16)	KALIMANTAN TIMUR
4. Kode/Nama Satker : (691607)	Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II
Sebesar : Rp. 170.115.000	(SERATUS TUJUH PULUH JUTA SERATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
 06.90 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA
 Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
 146.06.1A Program Perumahan dan Kawasan Permukiman
 146.06.1A.7602 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	170.115.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	0	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBN PBS	Rp.	0

D. Pencarian dana dilakukan melalui :

1. KPPN SAMARINDA	(046) Rp.	170.115.000
-------------------	-----------	-------------

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencarian dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Pencarian Penarikan Dana dan Penarikan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA ini sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
 A.N. MENTERI KEUANGAN
 DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
 LUKY ALFIRMAN
 NIP. 197005271995031002

DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 146.06.1.691607/2026
I A. INFORMASI KINERJA


051733-9741-9809-0152

Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Unit Organisasi : (06) DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
 Provinsi : (16) KALIMANTAN TIMUR
 Kode/Nama Salur : (691607) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Halaman : I A. 1

Program	: 146.06.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		170.115.000
Kegiatan	: 7662	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman		170.115.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:			
Klasifikasi Rincian Output	1 : 7662.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	3,00 Rekomendasi Kebijakan	132.800.000
Rincian Output	: 01 ABF.004	Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1,00 Rekomendasi Kebijakan	33.707.000
	: 02 ABF.005	Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	2,00 Rekomendasi Kebijakan	99.093.000
Klasifikasi Rincian Output	2 : 7662.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00 Laporan, Layanan	37.315.000
Rincian Output	: 01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	1,00 Laporan	37.315.000

Jakarta, 01 Desember 2025
 A.N. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO
 ttd.
 AZIS ANDRIANSYAH
 NRP. 77050672

Gambar 2.15 DIPA Revisi ke 1 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko


KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Mustofa Otfan**
 Jabatan : Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

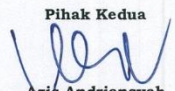
Nama : **Azis Andriansyah**
 Jabatan : Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Azis Andriansyah
 NRP. 77050672

Jakarta, 28 Januari 2026

Pihak Pertama


Mustofa Otfan
 NIP. 198303182009011001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026			
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II			
DIREKTORAT JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO			
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	2 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	2 Rekomendasi Kebijakan
3	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman	3 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	1 Rekomendasi Kebijakan

KEGIATAN	PAGU APBN
1 Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp 170,115,000.00

Jakarta, 28 Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL TATA KELOLA DAN PENGENDALIAN RISIKO	KEPALA BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KALIMANTAN II
	
AZIS ANDRIANSYAH	MUSTOFA OTFAN

Gambar 2.16 Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Target dalam Dokumen Rencana Aksi ini juga direncanakan dengan mempertimbangkan target yang sudah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BP3KP Kalimantan II Tahun 2025-2029 dimana target dalam Renstra tersebut ditetapkan sebagai arah dan pedoman pencapaian kinerja jangka menengah yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan jangka waktu 5 tahun. Dalam implementasinya, target Renstra tersebut dijabarkan ke dalam target kinerja tahunan melalui dokumen perencanaan dan penganggaran yang tertuang dalam Dokumen Rencana Aksi, yang selanjutnya dioperasionalkan ke dalam target capaian triwulanan sebagai dasar pelaksanaan dan pemantauan kinerja secara periodik yang akan tertuang dalam Laporan Triwulan. Berikut adalah target yang tertuang dalam Rencana Strategis BP3KP Kalimantan II terkhusus pada tahun 2026.

Tabel 2.10 Target Rencana Strategis BP3KP Kalimantan II Tahun 2026

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp Ribu)
-1	-2	-3	-4	-5
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
SASARAN STRATEGIS:				
Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan				
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS:				
1	Persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi			

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp Ribu)
-1	-2		-3	-4	-5
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Hunian Layak					
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi					
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II					
OUTPUT KEGIATAN:					
	1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	175.000
	2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dokumen	1	60.000
	3	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja	Laporan	-	-
	a	BP3KP Kalimantan II	Laporan	-	-
	b	Satker Provinsi Kalimantan Selatan	Laporan	-	-
	c	Satker Provinsi Kalimantan Timur	Laporan	-	-
	d	Satker Provinsi Kalimantan Utara	Laporan	-	-
	e	Satker IKN	Laporan	-	-
	4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Laporan	1	32.632
	a	BP3KP Kalimantan II	Laporan	1	32.632
	b	Satker Provinsi Kalimantan Selatan	Laporan	-	-
	c	Satker Provinsi Kalimantan Timur	Laporan	-	-
	d	Satker Provinsi Kalimantan Utara	Laporan	-	-
	e	Satker IKN	Laporan	-	-
	5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Kegiatan	-	-
	6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1	1.168.686
	7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dokumen	1	452.253
	8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan	4	1.551.126
	a	BP3KP Kalimantan II	Laporan	1	727.485
	b	Satker Provinsi Kalimantan Selatan	Laporan	1	233.805
	c	Satker Provinsi Kalimantan Timur	Laporan	1	280.842
	d	Satker Provinsi Kalimantan Utara	Laporan	1	308.994
	e	Satker IKN	Laporan	-	-
	9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	190.000
	10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan	5	445.000
	a	BP3KP Kalimantan II	Laporan	1	155.000
	b	Satker Provinsi Kalimantan Selatan	Laporan	1	75.000
	c	Satker Provinsi Kalimantan Timur	Laporan	1	70.000

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp Ribu)
-1	-2		-3	-4	-5
	d	Satker Provinsi Kalimantan Utara	Laporan	1	70.000
	e	Satker IKN	Laporan	1	75.000
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum					
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II					
OUTPUT KEGIATAN:					
1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit	915	13.411.095	
	b Kalimantan Selatan	Unit	682	9.996.029	
	c Kalimantan Timur	Unit	181	2.652.905	
	d Kalimantan Utara	Unit	52	762.161	
2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	Unit	-	-	
3	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dokumen	-	-	
4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dokumen	1	2.899.352	
5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dokumen	1	293.370	
6	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	105.000	
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni					
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni					
OUTPUT KEGIATAN:					
1	Jumlah unit rumah swadaya	Unit	9.173	222.055.398	
	a Kalimantan Selatan	Unit	4.063	98.355.073	
	b Kalimantan Timur	Unit	3.170	76.737.775	
	c Kalimantan Utara	Unit	1.940	46.962.550	
2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit	1.793	772.683.713	
	a Kalimantan Selatan	Unit	239	102.995.765	
	b Kalimantan Timur	Unit	775	333.982.085	
	c Kalimantan Utara	Unit	779	335.705.863	
3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit	220	414.155.460	
	a Kalimantan Selatan	Unit	88	165.662.184	
	b Kalimantan Timur	Unit	44	82.831.092	
	c Kalimantan Utara	Unit	44	82.831.092	
	d IKN	Unit	44	82.831.092	
4	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Laporan	1	88.500	

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp Ribu)
-1		-2		-3	-4	-5
	5	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh		Laporan	-	-
		a	BP3KP Kalimantan II	Laporan	-	-
		b	Satker Provinsi Kalimantan Selatan	Laporan	-	-
		c	Satker Provinsi Kalimantan Timur	Laporan	-	-
		d	Satker Provinsi Kalimantan Utara	Laporan	-	-
		e	Satker IKN	Laporan	-	-
	6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan		Laporan	1	482.511
	7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan		Rekomendasi Kebijakan	1	246.000
	8	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan		Rekomendasi Kebijakan	1	1.920.000
	9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan		Laporan	-	-
		a	BP3KP Kalimantan II	Laporan	-	-
		b	Satker Provinsi Kalimantan Selatan	Laporan	-	-
		c	Satker Provinsi Kalimantan Timur	Laporan	-	-
		d	Satker Provinsi Kalimantan Utara	Laporan	-	-
		e	Satker IKN	Laporan	-	-
	10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan		Rekomendasi Kebijakan	1	120.000
	11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan		Rekomendasi Kebijakan	1	2.582.700
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan						
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan						
OUTPUT KEGIATAN:						
	1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan		Rekomendasi Kebijakan	1	85.000
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS						
2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu					
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh						
KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh						
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu						
OUTPUT KEGIATAN:						
	1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu		Hektar	15,00	31.575.000
		a	Kalimantan Selatan	Hektar	-	-
		b	Kalimantan Timur	Hektar	-	-

PROGRAM/KEGIATAN			SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp Ribu)
-1			-2		-3	-4	-5
			c	Kalimantan Utara	Hektar	15,00	31.575.000
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS							
3	Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan						
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman							
KEGIATAN: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman							
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman							
OUTPUT KEGIATAN:							
	1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko			Laporan	1	52.600
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel							
OUTPUT KEGIATAN:							
	1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas			Rekomendasi Kebijakan	1	182.150
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman							
OUTPUT KEGIATAN:							
	1	Jumlah penerapan manajemen risiko			Rekomendasi Kebijakan	1	225.000
	2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan			Rekomendasi Kebijakan	1	225.000
SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman							
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS							
1	Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman						
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II							
KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II							
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II							
OUTPUT KEGIATAN:							
	1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)			Layanan	5	109.713.909
	a	BP3KP Kalimantan II			Layanan	1	32.576.119
	b	Satker Provinsi Kalimantan Selatan			Layanan	1	19.361.278
	c	Satker Provinsi Kalimantan Timur			Layanan	1	25.354.055
	d	Satker Provinsi Kalimantan Utara			Layanan	1	15.980.737
	e	Satker IKN			Layanan	1	16.441.720

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)/SASARAN KEGIATAN (<i>OUTPUT</i>)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp Ribu)
-1	-2		-3	-4	-5
2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)		Layanan	5	214.200
	a	BP3KP Kalimantan II	Layanan	1	63.600
	b	Satker Provinsi Kalimantan Selatan	Layanan	1	37.800
	c	Satker Provinsi Kalimantan Timur	Layanan	1	49.500
	d	Satker Provinsi Kalimantan Utara	Layanan	1	31.200
	e	Satker IKN	Layanan	1	32.100
3	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)		Layanan	5	999.248
	a	BP3KP Kalimantan II	Layanan	1	296.695
	b	Satker Provinsi Kalimantan Selatan	Layanan	1	176.338
	c	Satker Provinsi Kalimantan Timur	Layanan	1	230.919
	d	Satker Provinsi Kalimantan Utara	Layanan	1	145.549
	e	Satker IKN	Layanan	1	149.747
4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Kawasan Permukiman)		Layanan	5	464.000
	a	BP3KP Kalimantan II	Layanan	1	104.000
	b	Satker Provinsi Kalimantan Selatan	Layanan	1	71.000
	c	Satker Provinsi Kalimantan Timur	Layanan	1	103.000
	d	Satker Provinsi Kalimantan Utara	Layanan	1	85.000
	e	Satker IKN	Layanan	1	101.000
5	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Kawasan Permukiman)		Layanan	1	28.500
	a	BP3KP Kalimantan II	Layanan	1	28.500
6	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Kawasan Permukiman)		Layanan	1	27.000
	a	BP3KP Kalimantan II	Layanan	1	27.000
7	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)		Layanan	4	477.000
	a	BP3KP Kalimantan II	Layanan	1	139.500
	b	Satker Provinsi Kalimantan Selatan	Layanan	1	112.500
	c	Satker Provinsi Kalimantan Timur	Layanan	1	112.500
	d	Satker Provinsi Kalimantan Utara	Layanan	1	112.500
8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)		Layanan	1	14.131
	a	BP3KP Kalimantan II	Layanan	1	14.131
9	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)		Layanan	5	415.000
	a	BP3KP Kalimantan II	Layanan	1	125.000
	b	Satker Provinsi Kalimantan Selatan	Layanan	1	70.000
	c	Satker Provinsi Kalimantan Timur	Layanan	1	75.000
	d	Satker Provinsi Kalimantan Utara	Layanan	1	70.000
	e	Satker IKN	Layanan	1	75.000
10	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)		Layanan	1	85.000
	a	BP3KP Kalimantan II	Layanan	1	85.000

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET	ANGGARAN (Rp Ribu)
-1	-2	-3	-4	-5
11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	1	85.000
a	BP3KP Kalimantan II	Layanan	1	85.000
12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan	5	500.000
a	BP3KP Kalimantan II	Layanan	1	100.000
b	Satker Provinsi Kalimantan Selatan	Layanan	1	100.000
c	Satker Provinsi Kalimantan Timur	Layanan	1	100.000
d	Satker Provinsi Kalimantan Utara	Layanan	1	100.000
e	Satker IKN	Layanan	1	100.000

Sumber: Rencana Strategis BP3KP Kalimantan II Tahun 2025-2029

Dari kedua target yang telah dirumuskan berdasarkan Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan II TA 2026 dan Rencana Strategis BP3KP Kalimantan II Tahun 2025-2029 disusunlah target-target tersebut ke dalam target triwulanan. Penetapan target triwulanan bertujuan untuk memastikan bahwa capaian kinerja dapat dimonitor secara berkala, terukur, dan terkendali sepanjang tahun anggaran, sekaligus menjadi instrumen pengendalian internal dalam mengidentifikasi potensi deviasi serta merumuskan langkah korektif secara tepat waktu. Namun demikian, target dan rencana kinerja tersebut pada dasarnya bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan, khususnya yang berkaitan dengan penetapan maupun penyesuaian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Setiap perubahan DIPA yang terjadi, baik melalui penerbitan awal maupun revisi, dapat berdampak pada penyesuaian target kinerja, baik pada level tahunan maupun triwulanan.

Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi dan penyesuaian secara berkelanjutan antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja, seperti yang tertuang dalam Dokumen Rencana Aksi, Laporan Triwulanan, dan Laporan Akhir Tahunan sehingga keseluruhan proses tetap berjalan selaras, terarah, dan akuntabel dalam rangka mencapai sasaran strategis organisasi secara optimal.

2.2 Penetapan Target Kinerja Triwulan

Penetapan target triwulanan merupakan bagian integral dari proses perencanaan dan pengendalian kinerja yang bertujuan untuk menerjemahkan target tahunan ke dalam capaian yang lebih operasional dan terukur dalam periode waktu yang lebih pendek. Melalui pembagian target ke dalam interval triwulan, organisasi diharapkan dapat melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala, sehingga setiap pelaksanaan program dan kegiatan tetap berada pada jalur yang telah direncanakan. Selain itu, penetapan target triwulanan juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian untuk mengantisipasi potensi

deviasi serta memastikan adanya langkah korektif yang tepat waktu dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja secara efektif dan akuntabel.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Awal BP3KP Kalimantan dengan seluruh Unit Organisasi Kementerian PKP Tahun 2026 dan Rencana Strategis BP3KP Kalimantan II Tahun 2026, BP3KP Kalimantan II menjabarkan target pencapaian tahun 2026 dalam target kinerja triwulanan. Target kinerja triwulanan menjadi salah satu instrumen untuk melihat capaian kinerja secara berkala yang nantinya akan disampaikan dalam Laporan Kinerja Triwulanan, adapun dalam mencapai capaian kinerja tersebut dikeluarkan anggaran yang menyesuaikan target dan keadaan riil dalam pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan, adapun target yang ditetapkan per triwulanan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.11 Target Triwulan Kegiatan BP3KP Kalimantan II

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja			Target PK	Aktivitas	Target Capaian Per Triwulan			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
Sekretariat Jenderal								
Program Dukungan Manajemen								
SK 1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II							
1	Jumlah Layanan Umum	5 Layanan	Tw I – Perencanaan dan Persiapan Tw II – Pelaksanaan Kegiatan Tw III – Pelaksanaan Kegiatan Tw IV – Pelaksanaan dan Evaluasi	10,45%	52,40%	79,60%	100%	
2	Jumlah Layanan Perkantoran	5 Layanan		10,45%	52,40%	79,60%	100%	
3	Jumlah Layanan Sarana Internal	21 Unit		10,45%	52,40%	79,60%	100%	
Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman								
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman								
SK 1	Terselenggaranya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni							
1	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	Tw I – Perencanaan dan Persiapan Tw II – Pelaksanaan Kegiatan Tw III – Pelaksanaan Kegiatan Tw IV – Pelaksanaan dan Evaluasi	10,45%	52,40%	79,60%	100%	
2	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan		10,45%	52,40%	79,60%	100%	
SK 2	Meningkatnya perencanaan, fasilitasi penyiapan lahan dan pemenuhan yang terlayani PSU kawasan permukiman							
1	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Lahan dan Fasilitasi PSU	1 Dokumen	Tw I – Perencanaan dan Persiapan Tw II – Pelaksanaan Kegiatan Tw III – Pelaksanaan Kegiatan Tw IV – Pelaksanaan dan Evaluasi	10,45%	52,40%	79,60%	100%	
2	Jumlah Unit Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman	60 Unit		10,45%	52,40%	79,60%	100%	
SK 3	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di kawasan permukiman							
1	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	Tw I – Perencanaan dan Persiapan Tw II – Pelaksanaan Kegiatan Tw III – Pelaksanaan Kegiatan Tw IV – Pelaksanaan dan Evaluasi	10,45%	52,40%	79,60%	100%	
2	Jumlah Unit Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Sadaya di Kawasan Permukiman	900 Unit		10,45%	52,40%	79,60%	100%	

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target PK	Aktivitas	Target Capaian Per Triwulan			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
Program Dukungan Manajemen							
SK 1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman						
1	Jumlah Layanan Umum	5 Layanan	Tw I – Perencanaan dan Persiapan Tw II – Pelaksanaan Kegiatan Tw III – Pelaksanaan Kegiatan Tw IV – Pelaksanaan dan Evaluasi	10,45%	52,40%	79,60%	100%
2	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan		10,45%	52,40%	79,60%	100%
3	Jumlah BMN	1 Layanan		10,45%	52,40%	79,60%	100%
Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan							
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							
SK 1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan						
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan	Tw I – Perencanaan dan Persiapan Tw II – Pelaksanaan Kegiatan Tw III – Pelaksanaan Kegiatan Tw IV – Pelaksanaan dan Evaluasi	10,45%	52,40%	79,60%	100%
2	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Dokumen		10,45%	52,40%	79,60%	100%
3	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	3 Laporan		10,45%	52,40%	79,60%	100%
SK 2	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan						
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	Tw I – Perencanaan dan Persiapan Tw II – Pelaksanaan Kegiatan Tw III – Pelaksanaan Kegiatan Tw IV – Pelaksanaan dan Evaluasi	10,45%	52,40%	79,60%	100%
2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan		10,45%	52,40%	79,60%	100%
SK 3	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan						
1	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan	Tw I – Perencanaan dan Persiapan Tw II – Pelaksanaan Kegiatan Tw III – Pelaksanaan Kegiatan Tw IV – Pelaksanaan dan Evaluasi	10,45%	52,40%	79,60%	100%
2	Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	5400 Unit		10,45%	52,40%	79,60%	100%

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target PK	Aktivitas	Target Capaian Per Triwulan			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
Program Dukungan Manajemen							
SK 1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan						
1	Jumlah Layanan Umum	4 Layanan	Tw I – Perencanaan dan Persiapan Tw II – Pelaksanaan Kegiatan Tw III – Pelaksanaan Kegiatan Tw IV – Pelaksanaan dan Evaluasi	10,45%	52,40%	79,60%	100%
SK 2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan						
1	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan	Tw I – Perencanaan dan Persiapan Tw II – Pelaksanaan Kegiatan Tw III – Pelaksanaan Kegiatan Tw IV – Pelaksanaan dan Evaluasi	10,45%	52,40%	79,60%	100%
Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan							
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							
SK 1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						
1	Jumlah Kebijakan, Strategi, dan Program Prioritas Penyelenggaraan perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	Tw I – Perencanaan dan Persiapan Tw II – Pelaksanaan Kegiatan Tw III – Pelaksanaan Kegiatan Tw IV – Pelaksanaan dan Evaluasi	10,45%	52,40%	79,60%	100%
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	5 Laporan		10,45%	52,40%	79,60%	100%
SK 2	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan						
1	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	Tw I – Perencanaan dan Persiapan Tw II – Pelaksanaan Kegiatan Tw III – Pelaksanaan Kegiatan Tw IV – Pelaksanaan dan Evaluasi	10,45%	52,40%	79,60%	100%
SK 3	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan						

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target PK	Aktivitas	Target Capaian Per Triwulan			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan	Tw I – Perencanaan dan Persiapan Tw II – Pelaksanaan Kegiatan Tw III – Pelaksanaan Kegiatan Tw IV – Pelaksanaan dan Evaluasi	10,45%	52,40%	79,60%	100%
SK 4	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan						
1	Jumlah Unit Rumah Susun ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	44 Unit	Tw I – Perencanaan dan Persiapan Tw II – Pelaksanaan Kegiatan Tw III – Pelaksanaan Kegiatan Tw IV – Pelaksanaan dan Evaluasi	10,45%	52,40%	79,60%	100%
2	Jumlah Unit Rumah Susun MBR/Pekerja Perumahan	65 Unit		10,45%	52,40%	79,60%	100%
3	Jumlah Unit Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) Perumahan Perkotaan	240 Unit		10,45%	52,40%	79,60%	100%
4	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan		10,45%	52,40%	79,60%	100%
SK 5	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan						
1	Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	2100 Unit	Tw I – Perencanaan dan Persiapan Tw II – Pelaksanaan Kegiatan Tw III – Pelaksanaan Kegiatan Tw IV – Pelaksanaan dan Evaluasi	10,45%	52,40%	79,60%	100%
2	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan		10,45%	52,40%	79,60%	100%
Program Dukungan Manajemen							
SK 1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan						
1	Jumlah Layanan BMN dan Manajemen Keuangan	1 Layanan	Tw I – Perencanaan dan Persiapan Tw II – Pelaksanaan Kegiatan Tw III – Pelaksanaan Kegiatan Tw IV – Pelaksanaan dan Evaluasi	10,45%	52,40%	79,60%	100%
2	Jumlah Layanan Umum	5 Layanan		10,45%	52,40%	79,60%	100%
3	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1 Layanan		10,45%	52,40%	79,60%	100%
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko							
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							
SK 1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel						

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja		Target PK	Aktivitas	Target Capaian Per Triwulan			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan	Tw I – Perencanaan dan Persiapan Tw II – Pelaksanaan Kegiatan Tw III – Pelaksanaan Kegiatan Tw IV – Pelaksanaan dan Evaluasi	10,45%	52,40%	79,60%	100%
SK 2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman						
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Manajemen Risiko dan Pencegahan Korupsi	2 Rekomendasi Kebijakan	Tw I – Perencanaan dan Persiapan Tw II – Pelaksanaan Kegiatan Tw III – Pelaksanaan Kegiatan Tw IV – Pelaksanaan dan Evaluasi	10,45%	52,40%	79,60%	100%
SK 3	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman						
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	1 Laporan	Tw I – Perencanaan dan Persiapan Tw II – Pelaksanaan Kegiatan Tw III – Pelaksanaan Kegiatan Tw IV – Pelaksanaan dan Evaluasi	10,45%	52,40%	79,60%	100%

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2026

BAB 3

Penutup

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan
Permukiman Kalimantan II

Tahun Anggaran
2026



BAB III

PENUTUP

Rencana Aksi (Renaksi) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II Tahun 2026 merupakan dokumen strategis yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kalimantan II tahun 2025-2029 yang difokuskan membahas target tahun 2026 serta mendukung pencapaian target nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dokumen ini menekankan komitmen pemerintah dalam mewujudkan hak dasar warga negara atas hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Dengan disusunnya Rencana Aksi BP3KP Kalimantan II Tahun 2026 ini dan ditetapkannya indikator kinerja kegiatan Perencanaan Evaluasi serta Kegiatan Teknis Lainnya dapat mendorong penyelenggaraan Program Pengembangan Perumahan secara berhasil-guna dan berdaya-guna dalam rangka mencapai sasaran program yang sebaik-baiknya. Tersusunnya Rencana Aksi ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh unit kerja dalam mengelola program dan anggaran secara efektif, efisien, serta transparan. Keberhasilan pencapaian target kinerja sangat bergantung pada sinergi antar pemangku kepentingan dan konsistensi dalam monitoring serta evaluasi berkala di setiap triwulan.

Dokumen Rencana Aksi Kinerja ini disusun sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja dan dijabarkan ke dalam target triwulanan. Melalui rencana aksi ini, setiap program dan kegiatan dijabarkan secara lebih rinci dalam bentuk tahapan pelaksanaan, jadwal waktu, serta unit pelaksana yang bertanggung jawab, sehingga proses pengendalian dan pemantauan kinerja dapat dilakukan secara lebih efektif. Dengan adanya rencana aksi kinerja yang terstruktur dan terukur, diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara optimal, tepat waktu, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi.



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
REPUBLIK INDONESIA